

# POLITIK DINASTI DI ACEH; STUDI KEPEMIMPINAN AMPON BANG DI KABUPATEN NAGAN RAYA

**Aklima**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
*aklima8823@gmail.com*

**Ilham Ramadhan**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
*ilhamramadhannr@gmail.com*

## **Abstract**

*The focus of study the political dinasti strategic Ampon Bang of Nagan Raya distric. The aim of reseach to find out the political strategic that strengthens the couse of the political dynasty Ampon Bang aplicatin in Nagan Raya distric. The methodology used is kualitatif methode collecting data throughdocumentation and in dept interview technic. The Result of the research obtained political dynasty leadershipAmpon Bang Usingthe concept of the families with the political strategic carried out; first, leadership organisation structure is filled by family and relatives. Second, close the space for public partisipation.*

**Keywords;** *Political dinasti, Leadership, Political strategic.*

## **A. PENDAHULUAN**

Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elite politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat menyebutnya oligarki politik. Dalam konteks indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka terkadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan menjadi beberapa kategori elite diantara; elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit aktifis.<sup>1</sup>

Dinasti politik juga dikenal dengan tiga konsep lain diantaranya; Pertama, familisme dengan ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, kebiasaan

---

<sup>1</sup>. Alim Bathoro, *Perangkap Dinasti Politik* dalam Konsolidasi Demokrasi, Jurnal Fisip Umrah, Vol. 2, 2011: 115-125.

menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial politik lainnya. Dalam pengertian lainnya, familisme ini di pahami sebagai new social order, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai komporat-swasta.<sup>2</sup>

Kedua, Quasi-familisme, model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang di maksudkan secara harfiah tidak di maknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme yang sama dengan keluarga tersebut. Artinya, dimensi dinasti politik ininitidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, melainkan memiliki sistem kekerabatan berbasis artifisial.

Ketiga, Egoisme-familisme, model dinasti politik didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme di dasari pada dua konteks egoisme yakni Egoisme dari kepala daerah dengan kecenderungan yang mendahulukan keluarga daripada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan. Kepala daerah yang digantikan masih memiliki pengaruh terhadap penggantinya. Hal ini di lakukan dengan tujuan mengamankan program-program kebijakan maupun proses penganggaran yang telah dilakukan.<sup>3</sup> Egoisme di sisi masyarakat dengan kecenderungan untuk menjaga agar famili tertentu tetap menguasai tampuk kekuasaan. Hal tersebut terjadi karena penguasa berhasil membina dan memperkuat kohesi sosial dengan masyarakat melalui serangkaian program kebijakan “gentong babi”, meskipun sarat dengan tindak perilaku korupsi hanya menyangkut usaha politisasi anggaran. Dengan adanya program populis tersebut, penguasa dapat menanamkan romantisme dan jejaring politik secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Masyarakat menilai bahwa rezim

---

<sup>2</sup>. Wasito Raharjo Djati, *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di Aras Lokal, Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No.2, Juli 2013: 20-231.

<sup>3</sup>. *Ibid.*

penguasa dinilai berhasil mengeluarkan kebijakan populis maupun budaya permisif yang masih kuat di masyarakat.

Ketiga pemahaman dinasti politik ini dijadikan landasan berpikir dalam menganalisis dinamika dinasti politik di Aceh dengan studi kasus sistem kepemimpinan T. Zukkarnain (Ampon Bang) di Kabupaten Nagan Raya. Dengan hipotesa awal bahwa pola kepemimpinan Ampon Bang di kelilingi oleh keluarga, dengan skema kedudukan berikut ini; (1) Kelima ( Istri Ampon Bang) sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya periode 2014-2019, (2) T Syarizal/ Popon (Anak Ampon Bang) menduduki Jabatan sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM-KB), (3) Cut Intan Mala ( Kerabat Dekat/Keluarga) sebagai Kepala Dinas Pendidikan, (4) T. Jamalul Alamuddin (Keluarga/Kerabat Dekat) menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, (5) TR Keumangan (Keluarga/Kerabat Dekat) menjabat sebagai kepala Bappeda Nagan Raya<sup>4</sup>.

Di lain sisi Ampon Bang ini merupakan salah satu aktor terkuat di Nagan Raya, yang mampu memperoleh kedudukan sebagai Bupati selama dua periode. Sehingga menarik untuk dikaji seperti apa strategi politik dinasti Ampon Bang di Kabupaten Nagan Raya?.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan locus penelitian di Kabupaten Nagan Raya. Adapun teknik pengumpulan melalui proses dokumentasi/perpustakaan dan wawancara secara mendalam.

## **C. PEMBAHASAN**

### **a) Sistem Kepemimpinan Ampon Bang**

Nagan raya merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Barat yang terbentuk pada tahun 2002. Pemekaran ini dilakukan upaya untuk mengelola pemerintahan yang lebih efektif dikarenakan wilayahnya yang sangat luas.

---

<sup>4</sup>. Ibid.

Pemekaran tersebut di tandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>5</sup>

Ampon Bang merupakan Kepala Daerah pertama yang ditunjuk langsung untuk memangku jabatan sebagai penanggung Jawab (PJ) Bupati pasca pemekaran kabupaten Nagara Raya pada Tahun 2002. Jabatan sebagai Bupati ini kemudian bertahan hingga dua periode dengan sistem pemilihan pada Tahun 2007 dan Tahun 2012. Lama nya masa kepemimpinan Ampon Bang ini menjadi salah satu indikator yang mampu melahirkan pola oligarki politik secara umum. Kekuasaan dalam oligarki politik menurut Duverger (1993) yaitu kekuasaan terdiri dari seluruh kerangka institusi sosial yang berhubungan dengan otoritas yang mendominasi secara personal, institusi serta masyarakat menjadi objek yang disasar sebagai kapasitas yang menguatkan kekuasaan oligarki tersebut.<sup>6</sup> Sehingga tindakan dan keputusan yang dibuat, semata-mata ditujukan bagi kepentingan mereka, para oligarki. Pola kekuasaan oligarki ini terletak pada elite yang berkuasa (Pemimpin) dan berbeda dengan konsep demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Dalam konsep demokrasi kekuasaan tertinggi adalah rakyat.

Kepemimpinan Ampon Bang bersifat diktatoryang diistilahkan dengan kepemimpinan tangan besi. Tangan besi yang kemudian digunakan untuk memutasikan lawan politik yang dianggap tidak sejalan dengan bentuk kepemimpinan yang dijalankannya. Mutasi jabatan yang dilakukan ini semata-mata untuk mengikutsertakan para timses dan keluarganya untuk posisi-posisi strategis. Diktator ini yang kemudian dikategorikan menjadi salah satu pemicu lahirnya kekuatan politik dengan menempatkan keluarga dan kerabat dalam struktur organisasi kepemimpinan sebagai upaya mempertahankan jabatannya.

---

<sup>5</sup>. <http://www.dpr.go.id> diakses pada tanggal 25 Juli 2018.

<sup>6</sup>. Wiwin Suwandi, *Oligarki di Atas Panggung Demokrasi*, <http://www.negarahukum.com/hukum/oligarki-di-atas-panggung-demokrasi>, Di akses pada tanggal 28 Desember 2017.

Disisi lain politik Ampon Bang mampu membangun *Trust* politik di lingkungan masyarakat dengan bebarapa Prestasi yang mampu diwujudkan oleh Ampon Bang selama memimpin Nagan Raya. Adapun prestasi tersebut diantaranya; (1) pembangunan infrastruktur dan komplek perkantoran yang tertata dan rapi, (2) prestasi dalam bidang Wajar tanpa pengecualian (WTP) 7 kali dari tahun 2008-2014 serta Tahun 2017 dari badan pemeriksaan keuangan (BPK).<sup>7</sup> Kekuasaan dalam sistem kepemimpinan Ampon bang dapat dianalisis dengan sumber kekuasaan yang dicetuskan oleh Marchiavelli pada abad ke-16 yaitu; kekuasaan dapat diperoleh dengan hubungan yang baik atau prestasi yang baik (kekuasaan Pribadi) dan Rasa Takut (kekuasaan jabatan) yang diisi oleh keluarga dan kerabat.<sup>8</sup>

b) Strategi kekuatan Dinasti politik Ampon Bang

Kekuatan politik ditentukan oleh strategi kepemimpinan yang dijalankan selama menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ada beberapa indikator yang menentukan kekuatan politik dari setiap Aktor politik yang berkuasa, diantaranya; Pertama, membangun simpati masyarakat (*trust building*) terhadap pola pemerintahan yang dijalankan serta kedekatan emosional antara pemimpin dengan yang dipimpin; Kedua, stabilitas politik di internal kepemimpinan serta partai pengusung; Ketiga, Prestasi kerja yang dilakukan berasaskan pembangunan bagi masyarakat.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Ampong Bang pada masa pemerintahannya yaitu;

**a. Struktur organisasi kepemimpinan diisi oleh keluarga dan kerabat**

Ampon Bang merupakan elite penguasa yang memiliki basis suara yang dapat dimobilisasi sesuai dengan keinginannya. Hal ini dibuktikan melalui hasil data yang diperoleh sebagai berikut;

*ketika istrinya menjadi caleg pun Ampon Bang membantu mempromosikan dan ikut mengamppanyekan istrinya di hadapan masyarakat.*

---

<sup>7</sup>. <http://www.bpk.go.id/> di akses pada tanggal 26 Juli 2018.

<sup>8</sup>. *Ibid.*

Peran Ampon Bang dalam memenangkan istrinya mampu mempengaruhi masyarakat untuk menjadikan istrinya sebagai salah satu Ketua DPRK kabupaten Nagan Raya Tahun 2014. Selain dari Istri hal serupa juga dilakukan oleh Ampon Bang pada Tahun 2017 dalam memenangkan salah satu keluarga, seperti data yang diperoleh berikut ini:

*menyuruh para aparaturnya desa untuk mengikuti kemauannya seperti untuk membantu kemenangan adik kandungnya dalam pilkada Tahun 2017 di Nagan Raya. sehingga kita sebagai warga biasa tidak memiliki kebebasan dalam memilih sesuai keinginan hati kita”<sup>9</sup>*

Politik gerilyanya Ampon Bang pada Tahun 2014 dan 2017 merupakan wujud dari pola pertahanan politik yang dilakukan dengan memposisikan diri sebagai aktor penting dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu posisi-posisi tertentu dalam struktur organisasi juga diisi oleh para kerabat dan keluarga, hal ini dapat dilihat dari data berikut ini;

*Seperti yang kita lihat, selama Ampon Bang menjabat sebagai Bupati Nagan Raya banyak saudara atau kerabat beliau yang menduduki berbagai posisi di dinas-dinas tertentu seperti anak kandungnya pada saat itu di dinas dispora, kemudian di dinas kelautan ada mamak dari pada Ampon Bang dengan bapaknya kepala dinas tersebut itu adik kakak, kemudian di dinas kesehatan juga ada adik kandungnya. Pokoknya secara keseluruhan yang berkaitan dengan pimpinan Kabupaten Nagan Raya baik itu kepala dinas dan yang lainnya, itu memang diduduki oleh saudara atau kerabat beliau”<sup>10</sup>.*

Penempatan keluarga dan kerabat pada struktur organisasi dibawah kepemimpinan Ampon Bang ini membawa pengaruh buruk bagi sistem demokrasi. Salah satu nilai dalam demokrasi menurut Henry B. Mayo yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rules*). Penyelenggaraan pergantian pimpinan melalui demokrasi, tidak dengan keturunan atau *coup d`etat*<sup>11</sup>.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa strategi politik yang dilakukan oleh Ampon Bang dalam mempertahankan kekuasaannya yaitu

---

<sup>9</sup>. M. Abbas, Wawancara pada tanggal 31 Juli 2018. (M. Abbas merupakan aparaturnya desa yang terkena dampak dari kepemimpinan tangan besi Ampon Bang)

<sup>10</sup>. Hasil Wawancara dengan Akademisi Politik Nagan Raya, Izwar, S.IP Pada Tanggal 2 Agustus 2018.

<sup>11</sup>. Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 62-63.

memfasilitasi keluarga dan kerabat untuk menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan ini tentunya mempengaruhi sistem demokrasi di Indonesia khususnya kabupaten Nagan Raya. Dimana peluang partisipasi masyarakat tidak bebas dan terbuka dalam menentukan hak politik.

### **b. Membatasi Ruang Partisipasi Masyarakat**

Menurut Agustino (2010), ditingkat politik lokal di Indonesia masih ditawan oleh pengaruh *local strongmen* dan *roving bangdit* sehingga ruang partisipasi masyarakat masih termobilisasi atas dasar kepentingan elit-elit lokal<sup>12</sup>. Ampon Bang merupakan salah satu local Strongmen di Kabupaten Nagan Raya, nilai pengaruh dari kekuasaan yang dimiliki pada masa jabatannya mampu mendekati masyarakat sesuai dengan keinginannya. Pola mobilisasi yang dilakukan diantaranya; pertama; melakukan doktrin politik kepada PNS dan Aparatur desa. Doktrin ini dilakukan dalam upaya pemenangan keluarga atau kerabat yang ikut serta dalam kontestasi di Tahun 2014 dan 2017. Kemenangan yang diperoleh oleh keluarga dan kerabat ini dinilai sebagai upaya mempertahankan kekuasaan dinasti politiknya.

*Jadi begini, ada banyak baliho yang terpasang di rumah-rumah pejabat, mereka harus memasang baliho itu atas kehendak penguasa kalau tidak ya siap-siap saja di mutasi jabatannya"*

Doktrin politik ini dilakukan dengan pola penekanan pada psikologis dengan ancaman mutasi jabatan. Merujuk ke teori *local bossim*, sikap intimidasi tersebut memiliki relevansinya dengan apa yang dikatakan sidel dalam teori local bossim. Bahwa untuk menunjukkan eksistensinya dalam mempertahankan kekuasaannya, pemerintah lokal melakukan beberapa strategi di antaranya; (a), Menempatkan kerabat dan kroni di posisi-posisi strategis di pemerintahan; (b) Membentuk mesin politik sebagai broker suara (c) Mengatur penempatan pejabat daerah; (d) Mengatur proyek pemerintah dan dana aspirasi; (e) Mengatur peraturan daerah; (f) Mengatur keringanan pajak; (g) Mengatur peminjaman dari bank dan bank pembangunan

---

<sup>12</sup>. Wasito Raharjo Djati, *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal, Jurnal Sosiologi Masyarakat*.

daerah; (h) Memberikan konsesnsi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan perkebunan; (i) Intimidasi dan kekerasan politik; (j) Menerapkan kebijakan tangan besi untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh<sup>13</sup>.

### c) Dampak Positif Politik Dinasti di Kabupaten Nagan Raya

Dampak positif dari sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Ampon Bang dapat dilihat sebagai berikut; Pertama, Sektor Infrastruktur merupakan bagian pembangunan nyata sebagai prestasi dari kinerja Ampon Bang.

*"Dulu komplek Suka Makmue ini masih hutan raya, tapi sekarang bisa kita lihat sangat rapi dan bagus penataan kantor dan infrastrukturnya"*<sup>14</sup>.

Kedua, Penggunaan APBK tepat sasaran, Dampak positif lainnya dari politik dinasti Ampon Bang di Nagan Raya adalah memperoleh gelar wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK) RI selama delapan tahun berturut-turut. Ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari kepemimpinan politik dinasti Ampon Bang dan berdampak positif terhadap pembangunan Nagan Raya.

*"Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, Nagan raya dapat delapan kali berturut-turut. jadi itulah pencapaian-pencapaian yang Ampon Bang raih selama ini."*<sup>15</sup>.

Prestasi kerja Ampon bang ini dinilai bagian dari keberhasilan yang mampu membangun *trust* masyarakat. Sehingga pola mobilisasi dalam suksesi pemenangan keluarga yang dilakukan Ampon Bang mendapat sambutan yang baik dari sebagian masyarakat Nagan Raya.

### d) Dampak Negatif Politik Dinasti di Kabupaten Nagan Raya

Menguatnya sistem dinasti politik dalam sebuah wilayah memiliki pengaruh negatif terhadap keberlangsung tata kelola pemerintahan, adapun dampak negatifnya; pertama, lahirnya local strongman yang mampu menjadi influencer terhadap pola partisipasi masyarakat. Pengaruh influencer ini yang akan

---

<sup>13</sup>. Sidel, John T, *Macet Total : Logistic of Circulation and Accumulation in the Demise of Indonesia New Orders*, Indonesia 66: 67.

<sup>14</sup>. Ibid.

<sup>15</sup>. Junaidi, Geuchik Gampong Blang Baro. Wawancara 31 Agustus 2018.

memobilisasi massa sesuai kepentingan politik. Misalkan, peran Ampon Bang dalam suksesi kemenangan istri, anak dan kerabatnya mampu mendekati masyarakat pemilih sesuai kehendaknya. selain ini pengaruh dari local strongman ini juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Kelompok kepentingan yang dianggap memiliki kedekatan secara emosional dapat mengakses dengan mudah kesempatan yang tersedia. Misalkan, lelang proyek pembangunan hanya akan dimenangkan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Kedua, Tidak terakomodasi aspirasi masyarakat sehingga menghambat peluang masyarakat untuk mensuarakan aspirasi. Ketiga, cacatnya hak politik masyarakat. Sistem demokrasi menjamin hak yang sama dan bersifat bebas dan terbuka. Pola kepemimpinan dinasti politik memberikan dampak negatif dalam praktek kesamaan politik. Dimana hak suara yang diberikan merupakan hasil pesanan yang dititipkan pemangku kepentingan.

#### **D. KESIMPULAN**

Penerapan sistem dinasti politik merupakan penerapan politik 'Se maunya gue' yang dilakukan berdasarkan kehendak elite politik atas dasar kepentingan yang menguntungkan sebagian pihak. Pola kinerja dari dinasti politik menutup ruang partisipasi politik dari masyarakat sebagaimana layaknya penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Sehingga Dinasti politik harus dicegah sebelum lahirnya konflik-konflik sosial yang berdampak pada pemeretaan dalam pembangunan ekonomi politik di sebuah wilayah.

Pendidikan politik harus menjadi acuan penting dalam proses pencegahan terjadi dinasti politik. Dinasti politik merupakan sebuah sistem yang akan melahirkan kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Pola kepemimpinan dinasti politik Ampon Bang dapat dianalisis dengan konsep Families. Pola kepemimpinan yang menempatkan keluarga pada struktur- struktur politik upaya memiliki kontrol yang kuat terhadap kekuasaan politik. selain ini, sistem dinasti politik yang dijalankan Ampon Bang menekan kebebasan masyarakat dalam

menentukan hak politik sebagai warga negara yang menganut sistem demokrasi. Sehingga hak politik masyarakat dapat didikte sesuai dengan kepentingan Ampon Bang dalam menjaga stabilitas politik selama 15 Tahun.

Disisi lain, sistem kepemimpinan dinasti politik yang dijalankan Ampon Bang dinilai sukses dalam penataan infrastruktur dan penggunaan APBK tepat sasaran. Meskipun demikian secara aplikasi sistem demokrasi, dinasti politik menutup kemungkinan bagi masyarakat Nagan Raya untuk menentukan keterwakilan politik dengan ikut serta sebagai yang dipilih atau memilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faruqi, Y. M. (2015). Role of Muslim Intellectuals in the Development of Scientific Thought. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 451-466.
- Haynes, J. (2015). Religion in Global Politics: Explaining Deprivatization. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(2), 199-216.
- Idris, S., ZA, T., & Sulaiman, F. (2018). Critical Education Paradigm in the Perspective of Islamic Education. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8226-8230.
- Keller Suzanne, 1995, *Penguasa dan Kelompok Elit*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power

- and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Patimah, S., & Tabrani, Z. A. (2018). Counting Methodology on Educational Return Investment. *Advanced Science Letters*, 24(10), 7087-7089.
- Robert van Niel, 1984, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Pustaka Jaya Jakarta.
- Sidel, John T, *Macet Total: Logistic of Circulation and Accumulation in the Demise of Indonesia New Orders*, Indonesia 66: 67.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2012). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, 18(2), 271-284.
- Tabrani ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- Tabrani ZA. (2016). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 41-56.
- Tan, C. (2015). Educative Tradition and Islamic School in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 417-430.
- Usman, N., AR, M., Murziqin, R., & ZA, T. (2018). The Principal's Managerial Competence in Improving School Performance in Pidie Jaya Regency. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8297-8300.
- Wasito Raharjo Djati, *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik Diaras Lokal*, Jurnal Sosiologi Masyarakat.

